

# Kekerasan Politik-Agama<sup>1</sup>

**D**ari sejumlah pengertian tentang kekerasan, kita dapat memilahnya dalam tiga kelompok besar yaitu kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur.

Kelompok pertama dipelopori ahli biologi, fisiologi dan psikologi. Para pendukung teori biologi dan fisiologi berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (innate) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. Mereka meneliti hubungan kekerasan dengan keadaan biologis manusia, namun mereka gagal memperlihatkan faktor-faktor biologis sebagai faktor penyebab kekerasan.<sup>2</sup> Juga belum ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa manusia dari pembawaannya memang suka kekerasan.

Gustave Le Bon (1895) mendeskripsikan kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan crowd (kelompok aktor) yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan.<sup>3</sup> Ted Robert Gurr (1970) mendefinisikan kekerasan politik sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor yang menentang rezim yang berkuasa.<sup>4</sup> Charles Tilly (1975) menambahkan bahwa kekerasan akan berhasil apabila aktor mampu memobilisasi massa lewat suatu kalkulasi politik.<sup>5</sup>

Kelompok kedua, pengertian kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan Galtung (1975)

mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan Galtung menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis serta memperlihatkan stabilitas tertentu.<sup>6</sup> Dengan demikian kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur seperti aparatus negara.

Berbeda dengan Galtung yang melihat struktur bersifat sistemik dan tunggal, kelompok Pos-Strukturalis melihat struktur yang tidak sistemik dan lebih dari satu. Pemikir Pos-Strukturalis seperti Frank Graziano (1992), Jacques Derrida (1997), Samuel Weber (1997), James K.A. Smith (1998), Robert Hefner (1999) dan James T. Siegel (1999) mengembangkan perhatian pada kekerasan struktural yang bertalian dengan politik-agama.

Graziano menjelaskan keterlibatan struktur negara lewat pelbagai cara, strategi dan tindak kekerasan, seraya secara munafik mengalihkan tanggung jawab akses perbuatan tersebut kepada rakyat.<sup>7</sup> Weber menguraikan kekerasan sebagai cara terstruktur untuk menunjukkan identitas diri dalam upaya penentuan nasib sendiri.<sup>8</sup> Derrida menawarkan investigasi politik terhadap kekerasan "atas nama agama" atau "agama tanpa agama".<sup>9</sup> Smith mengurai lebih lanjut dalil Derrida "agama tanpa agama" sebagai bentuk kekerasan yang tidak terkendalikan yang menyertai "kembaliannya agama" dalam maknanya yang paling kaku.<sup>10</sup> Hefner mengingatkan bahwa kekerasan bisa terjadi karena negara memanfaatkan agama, atau bisa pula agama memanfaatkan negara.<sup>11</sup> Siegel juga memperkuat dalil Derrida tentang "pembunuhan ganda" dalam struktur masyarakat dan negara.<sup>12</sup>

2 |

Kelompok ketiga, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur seperti dikemukakan Anthony Giddens (1985), Jennifer Turpin & Lester R. Kurtz (1997). Asumsi dari kelompok ini ialah konflik bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat(konflik sebagai sesuatu yang ditentukan), ada sejumlah alat alternatif untuk menyatakan/menyampaikan konflik sosial, untuk menyampaikan masalah kekerasan dengan efektif diperlukan perubahan dalam organisasi sosial dan individu, masalah kekerasan merupakan salah satu masalah pokok dari kehidupan modern, terdapat hubungan kekerasan level mikro - makro dan antara aktor - struktur (pemecahan masalah kekerasan struktural mengharuskan kita berkecimpung dalam kekerasan aktor, demikian sebaliknya), dan akhirnya spesialisasi akademik justru mengkaburkan masalah karena hal ini mengabaikan pendekatan yang holistik termasuk di dalamnya dimensi ruang dan waktu.<sup>13</sup>

Studi tentang kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur berawal dari kajian gender yang ingin menjawab pertanyaan "adakah hubungan antara struktur peperangan dengan memukul isteri?". Hubungan tersebut terletak pada budaya patriarki, di mana kaum pria mendominasi wanita yang menciptakan kekerasan aktor terhadap wanita dan anak-anak serta kekerasan struktural seperti perang. Ada dua bentuk hubungan kekerasan aktor dan struktur, pertama, adanya dialektika antara kekerasan aktor dan kekerasan struktur. Kedua, ada hubungan di antara berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada level aktor maupun struktur.<sup>14</sup>

13

Meminjam pikiran Galtung dan Graziano, maka kekerasan politik-agama yang merupakan persimpangan antara kekerasan dan agama di tengah repressi politik satu rezim dapat terjadi pada tiga aras yaitu negara, struktur sosial dan aktor dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>15</sup>

Aras	Pelaku	Dimensi	Sarana	Lingkup
Negara	Aparatus Negara	Fisik Non Fisik (teror)	Kebijakan publik Senjata dan organisasi tentara & polisi	Komprehensif
Struktur Sosial	Aparatus Negara Pemuka Agama Pengendali Kapital	Non Fisik (Politik, Agama, Ekonomi, Sosial, Budaya)	Kebijakan publik Proses dan sarana akumulasi kapital	Komprehensif
Aktor	Aktor Kelompok	Fisik	Tindakan Aktor Kelompok Anomie	Terbatas

Hal yang lebih penting untuk diurai ialah mengapa kekerasan politik-agama bisa terjadi. Seperti dinyatakan Gurr bahwa kekerasan politik dimulai dari diri aktor. Gurr menyatakan bahwa individu yang memberontak sebelumnya harus memiliki latar belakang situasi seperti terjadinya ketidakadilan, munculnya kemarahan moral, dan kemudian memberi respon dengan kemarahan pada sumber penyebab kemarahan tersebut. Selain itu, massa juga harus merasakan situasi konkrit dan langsung yang menjadi pendorong ungkapan kemarahan mereka, sehingga mereka bersedia menerima risiko yang berbahaya.<sup>16</sup>

Ketegangan yang terjadi akibat suatu kesenjangan antara *ought* dan *is* dalam keputusan nilai kolektif yang mendorong manusia melakukan kekerasan dijelaskan Gurr lewat deprivasi relatif. Deprivasi relatif yang didefinisikan sebagai kesenjangan antara ekspektasi nilai dan kapabilitas nilai.<sup>17</sup> Ekspektasi nilai adalah manifestasi sekumpulan norma yang diungulkan oleh lingkungan sosial dan kultural. Sedangkan kapabilitas nilai adalah posisi nilai rata-rata yang oleh anggota suatu kolektivitas dianggap mampu dicapai dan dipertahankan.<sup>18</sup>

Tilly menekankan pentingnya kalkulasi politik dan mobilisasi politik. Pemerintah dan pemegang kekuasaan itu sendiri memiliki kepentingan dalam membantu perkembangan beberapa bentuk aksi kolektif, mentolerirnya dan mengeliminasi lainnya dari tempat tersebut. Akibatnya pada tingkat tertentu, respon yang berbeda dari pihak pemegang kekuasaan terhadap bentuk aksi kolektif yang berbeda membentuk kembali aksi berikutnya. Di mana kemungkinan keuntungan dari aksi yang direpresi dan aksi yang ditolerir nampaknya sama. Umumnya

kelompok cenderung menekan dan menginovasi hal yang berbatasan dengan wilayah yang dilarang.

Meskipun hal tersebut kelihatannya sangat menguntungkan pemegang kekuasaan, namun mereka juga menghadapi kendala berupa biaya represi yang sangat mahal.<sup>19</sup> Untuk menutup biaya represi yang sangat mahal biasanya pemegang kekuasaan harus mengalihkan beberapa sumber usaha lainnya yang dinilai menguntungkan. Pemegang kekuasaan akan berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan cara mempertahankan bentuk aksi kolektif tertentu sejauh mereka dan pendukungnya menggunakan bentuk-bentuk tersebut. Para pendukung membantu dengan pelbagai rekayasa dalam mengorganisir kampanye, berbicara lewat pers dan menghimbau publik lewat pernyataan yang menguntungkan mereka. Tilly menekankan pentingnya mobilisasi politik yang bisa membuat benih gerakan massa semakin besar dan bisa membuat suatu revolusi lebih berhasil. Untuk itu diperlukan faktor pemicu yang dimobilisasi untuk mengugah perhatian massa.

Kekerasan politik-agama dalam kerusuhan dipengaruhi secara bersamaan oleh tekanan struktur sosial yang menghimpit mereka dalam kehidupan sehari-hari akibat perlakuan yang tidak adil, tidak jujur, serta motivasi dan kepentingan pribadi yang bersangkutan. Akumulasi kemarahan dan rasa frustrasi di tengah kehidupan sehari-hari, di samping *emotional illiteracy* (buta emosi) dan ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara cerdas serta cara yang telah ditempuh ternyata tidak membuahkan hasil, telah dibelokkan menjadi kekerasan massa

(*deflected aggression*) terhadap sasaran-sasaran utama yang sudah ditentukan sebelumnya (*precipitating factor*).

Kesadaran akan konflik terkait dengan seberapa parah tingkat penderitaan suatu komunitas dibanding kelompok lainnya, ketegasan identitas kelompok (tingkat penderitaan, tingkat perbedaan kultural, dan intensitas konflik), derajat kohesi dan mobilisasi kelompok, serta kontrol represi oleh kelompok dominan.

Perubahan demografi dalam bentuk yang alamiah, migrasi maupun konversi mengakibatkan radikalisasi agama dan persoalan pelapisan sosial yang berubah. Misalnya, radikalisasi suatu agama K yang menyebabkan laju pertumbuhan umat beragama K lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan umat beragama I yang merupakan mayoritas, menimbulkan upaya pembelaan diri dalam bentuk radikalisasi pula pada agama I, demikian pula sebaliknya. Perasaan bahwa kelompok agamanya dipinggirkan oleh kelompok agama lain juga dapat menimbulkan radikalisasi agama.

Duplikasi dalam pelapisan sosial juga menjadi persoalan dalam masyarakat majemuk. Komunitas suku M umumnya menganut agama I dan bermata pencaharian sebagai petani, komunitas suku C umumnya menganut agama K dan bermatapencaharian sebagai pedagang, sedangkan komunitas suku J umumnya menganut agama A dan menduduki jabatan administratif pemerintahan. Duplikasi seperti ini memungkinkan merbaknya persoalan pribadi yang sepele menjadi konflik antar agama atau suku.

Menurut teori kekerasan negara<sup>20</sup>, kekerasan merupakan akibat tak terelakkan dari modernisasi. Akumulasi kapital hanya dapat dilakukan lewat kekerasan. Kekerasan dapat dikurangi tarafnya hanya lewat bimbingan penguasa pusat yang mau menjaga masyarakatnya dan menekan gangguan-gangguan dalam proses pembangunan. Tindakan kekerasan dinilai harus diterima oleh komunitas terbelakang sebagai jalan yang tepat menuju modernisasi, meskipun langkah tersebut menimbulkan kekerasan jangka pendek berupa upah yang rendah, meningkatnya kekurangan gizi dan kondisi pemercepat kemiskinan.<sup>21</sup>

Kekerasan yang disebabkan oleh proses pembangunan sangat tergantung pada rezim tertentu. Rezim otoriter akan mempraktekkan kekerasan dan mengabaikan bentuk pemerintahan yang demokratis untuk sementara saja, hingga mereka berkembang lebih maju. Akan tetapi rezim totaliter akan melakukan lebih banyak kekerasan dan melakukannya terus-menerus.<sup>22</sup>

Kekerasan politik-agama di Indonesia berakar pada upaya masyarakat untuk membangun akses terhadap negara, sebagai produk dari reproduksi kekerasan negara yang efektif, dan belum adanya mekanisme penyelesaian konflik antar elit. Masyarakat butuh akses untuk mempengaruhi kebijakan negara, karena nasibnya ditentukan negara. Seandainya akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka tersedia, maka masyarakat akan menempuh mekanisme tersebut. Namun sistem politik Indonesia pada rezim Orde Baru tidak seperti itu. Akses konstitusional, legal, institusional dan terbuka nyaris tidak ada,

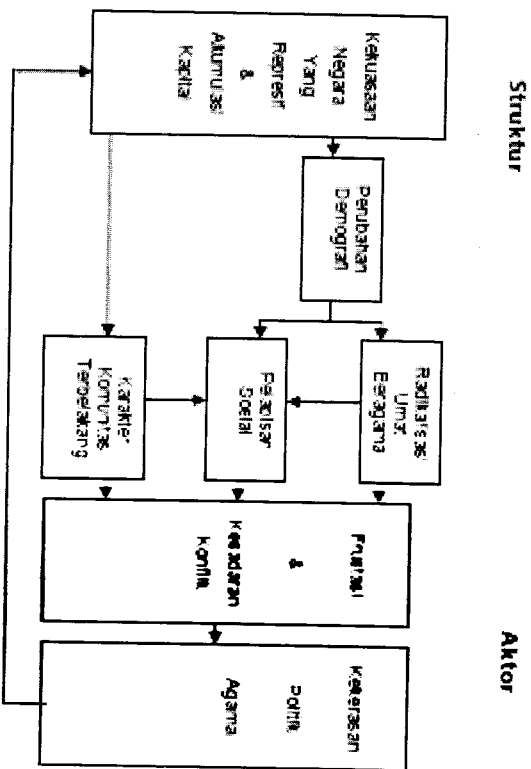
oleh karena itu masyarakat berupaya cari akses tersebut walaupun inkonstitusional, ilegal, sporadik dan tertutup. Reformasi yang digulirkan mahasiswa ternyata hanya mengubah mekanisme yang tertutup -- *hidden transcripts* --<sup>23</sup> menjadi terbuka, tetapi tetap sulit memproses lewat jalur konstitusional, legal, dan institusional. Jadi kekerasan politik-agama bukan berasal dari massa (kelompok aktor) saja atau struktur negara saja, tetapi ada proses dialogis antara struktur negara dan massa (kelompok aktor).

Negara adalah satu-satunya institusi yang secara sah memonopoli penggunaan kekuatan pemaksaan lewat aparatus negara, seperti militer, polisi, dan peradilan. Kekerasan dilegitimasi negara untuk mempertahankan kekuasaan. Seperti dinyatakan Arendt, kekerasan akan muncul bilamana kekuasaan sedang ada dalam bahaya, yang berarti bahwa meskipun kekerasan dapat menghancurkan kekuasaan, namun kekerasan tidak mampu menciptakan kekuasaan.<sup>24</sup> Pada awalnya kekerasan tersebut langsung dilakukan oleh negara. Namun dengan merebaknya isu hak asasi manusia, maka negara (rezim Orde Baru) tidak cukup menggunakan aparatus negara sebagai pemaksa, tetapi juga melibatkan masyarakat. Benih kekerasan telah merebak di masyarakat lewat pengorganisasian kriminal, bukan organisasi kriminal. Negara telah menggerakkan masyarakat untuk melakukan kekerasan.

Sistem politik demokrasi mengenal mekanisme penyelesaian konflik yang jelas lewat dukungan suara. Di Indonesia, mekanisme tersebut digunakan pada saat pemilihan umum. Namun sampai saat ini di Indonesia belum ada

pelembagaan politik yang mampu mengelola konflik antar elit dan belum ada kriteria yang jelas tentang konflik elit. Salah satu akibat dari konflik antar elit adalah merbaknya kekerasan massa. Kekerasan massa akan semakin intens dan sulit dikelola apabila pihak yang terlibat konflik mempolitisir ideologi dan atau agama.

Alur kerangka pemikiran kekerasan politik-agama dapat digambarkan sebagai berikut:



#### Catatan:

1. Bahan Diskusi Panel "Pengelolaan Dampak Kekerasan Massa : Pendekatan Multidisiplin" dalam rangka Ulang Tahun Fakultas Psikologi Ubaya ke XVII, Surabaya, 2 September 2000. Tulisan ini pernah dipresentasikan di Yogyakarta, 10 Juli 2000 dalam rangka kerjasama Flinders University Australia - Fisiol UGM dan di Pascasarjana Unair Surabaya, 28 Agustus 2000 dalam rangka diskusi kerangka teoritik kekerasan Politik-Agama.
2. Jennifer Turpin and Lester R. Kurtz, *The Web of Violence. From Interpersonal to Global*, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1997, hal. 3.
3. Jack D. Douglas and Frances Chaput Waksler, *The Sociology of Deviance. An Introduction*, Boston, Little Brown And Company, 1982, hal. 235.
4. Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton University Press, 1970, hal. 22.
5. Louise A. Tilly & Charles Tilly (Ed), *Class Conflict And Collective Action*, London, Sage Publications, 1981, hal. 17-22.
6. I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Gal tung*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1992, hal. 64.
7. Frank Graziano, *Divine Violence. Spectacle, Psychosexuality, & Radical Christianity in The Argentine "Dirty War"*, Colorado, Westview Press, 1992, hal. Ix
8. Hent De Vries and Samuel Weber (Ed), *Violence, Identity, and Self-Determination*, Stanford, Stanford University Press, 1997, hal. 1-2.

9. James K. Smith, Determined Violence: "Derrida's Structural Religion", *The Journal of Religion*, Volume 78, Number 1, Januari 1998, hal. 197.
  10. *Ibid.*, hal. 198.
  11. Robert Hefner
  12. James T. Siegel, *Early Thoughts on the Violence of May 13 and 14, 1998 in Jakarta*, SEAP Indonesia, number 66, Cornell University, 1999; lihat juga James T. Siegel, *Penjahat Gaya (Orde) Baru*. Eksplorasi Politik dan Kriminalitas, Yogyakarta, LKIS, 2000.
  13. Anthony Giddens, *The Nation-State and Violence*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1985, hal. 294-341 ; lihat juga Jennifer Turpin and Lester R. Kurtz, *op.cit.*, hal. 12-13.
  14. Jennifer Turpin and Lester R. Kurtz, *ibid.*, hal. 2.
  15. Modifikasi dari Mohtar Mas'ood, *Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta, PPPPK UGM dan Depag RI, 1998, hal. 7.
  16. Ted Robert Gurr, *op.cit.*, hal. 22.
  17. *ibid.*, hal 37.
  18. *ibid.*, hal 27.
  19. Louise A. Tilly & Charles Tilly, *op.cit.*, hal. 22.
  20. Pandangan Weberian yang menganggap negara sebagai arena netral bagi kelompok-kelompok masyarakat (*society-centered*) telah berkembang menjadi negara dianggap sebagai aktor (state-centered). Pandangan state-centered atau institutionalism approach ini dikembangkan oleh Theda Skocpol, Richard Robison, dkk. Perbedaannya dengan Marxian terletak pada cara melihat masyarakat. Weberian (casuquo state-centered) melihat masyarakat
- secara horisontal, sedangkan Marxian melihat masyarakat secara vertikal atau klas.
21. Jennifer Turpin and Lester R. Kurtz, *op.cit.*, hal. 6.
  22. *ibid.*
  23. James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*. Hidden Transcripts, New Haven and London, Yale University Press, 1990.
  24. Manfred B. Steger & Nancy S. Lind, *Violence and Its alternatives: An Interdisciplinary Reader*, 1999, hal. xv.
  25. Modifikasi dari Mohtar Mas'ood, *op.cit.*, hal. 20.